



2025

# LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK



*BADAN PUSAT STATISTIK*





2025

# LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK



*BADAN PUSAT STATISTIK*



## Kata Pengantar

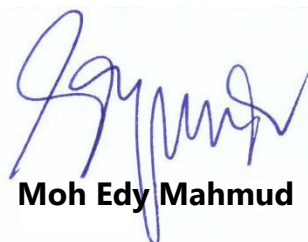
Sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik menyusun Laporan Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025. Laporan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, laporan ini dibuat dengan mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik selama tahun 2025 terhadap target yang sudah ditetapkan di awal tahun, yang meliputi: Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa datang.

Jakarta, 19 Januari 2026

Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik,



**Moh Edy Mahmud**



## Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Ringkasan Eksekutif .....	ix
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi .....	2
1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran .....	3
1.4. Potensi dan Permasalahan .....	6
1.5. Sistematika Penyajian Laporan .....	8
Bab II. Perencanaan Kinerja .....	9
2.1. Visi dan Misi, BPS .....	9
2.2. Target Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025-2029 ...	11
2.3. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 .....	14
2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 .....	15
2.4.1 Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral .....	15
2.4.2 Prioritas Nasional: Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi .....	16
2.4.3 Prioritas Nasional: Pemanfaatan <i>Big Data</i> untuk Statistik Resmi .....	17
2.4.4 Prioritas Presiden: Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional .....	17
2.4.5 Prioritas Presiden: Makan Bergizi Gratis .....	18
2.4.6 Isu Strategis Nasional: Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca .....	19
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	20
Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....	23

3.1	Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025.....	24
3.3	Capaian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Terhadap Renstra	31
3.4	Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 .....	33
3.4.1	Capaian Prioritas Nasional .....	33
3.4.2	Capaian Prioritas Presiden .....	38
3.4.3	Capaian Isu Strategis Nasional .....	40
3.5	Prestasi dan Inovasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik.....	41
3.6	Realisasi dan Efisiensi Anggaran .....	43
Bab IV.	Penutup.....	47
4.1	Kesimpulan .....	47
4.2	Tindak Lanjut Capaian.....	47
LAMPIRAN	.....	49
LAMPIRAN 1	STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK.....	49
LAMPIRAN 2	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025 .....	50
LAMPIRAN 3	PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025 .....	51
LAMPIRAN 4	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025.....	52
LAMPIRAN 5	JUMLAH PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK MENURUT UNIT KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2025 .....	54
LAMPIRAN 6	JUMLAH PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK MENURUT UNIT KERJA DAN GOLONGAN KEPANGKATAN TAHUN 2025 .....	55
LAMPIRAN 7	JUMLAH PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK MENURUT UNIT KERJA DAN JABATAN TAHUN 2025.....	56
LAMPIRAN 8	DAFTAR DOKUMEN PEMERINTAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR HITUNG TINGKAT PEMANFAATAN DATA STATISTIK LINTAS SEKTOR DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025 .....	57
LAMPIRAN 9	DAFTAR K/L TARGET PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025 .....	58
LAMPIRAN 10	DAFTAR PRESTASI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025 .....	59

LAMPIRAN 11 DAFTAR INOVASI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025 .....	62
LAMPIRAN 12 ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2025 .....	64

## Daftar Tabel

Hal.

Tabel 1 Sasaran, Indikator Kinerja, Satuan, dan Target Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik tahun 2025-2029 .....	13
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 .....	14
Tabel 3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	21
Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2023-2025.....	26
Tabel 5 Capaian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik terhadap Renstra 32	
Tabel 6 Realiasi Dan Efisiensi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	44

## Daftar Gambar

	Hal.
Gambar 1 Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2023-2025 (Persen).....	x
Gambar 2 Persentase Pegawai Deputi Bidang NAS menurut Jenis Kelamin (Persen), 2025.....	4
Gambar 3 Jumlah Pegawai Deputi Bidang NAS menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin (Orang), 2025.....	4
Gambar 4 Pegawai Deputi Bidang NAS menurut Tingkat Pendidikan (Persen), 2025 .....	5
Gambar 5 Penjelasan Visi BPS 2025-2029.....	10
Gambar 6 Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2023-2025 (Persen).....	24
Gambar 7 Predikat dan Interpretasi PKO berdasarkan Permenpan RB No. 22 Tahun 2024.....	25
Gambar 8 Perbandingan Capaian Kinerja Antar Eselon I Tahun 2025 .....	25

## Ringkasan Eksekutif

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPS menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yang dituangkan dalam rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan. Rencana kegiatan ini terangkum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPS 2025-2029, bertujuan agar menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan.

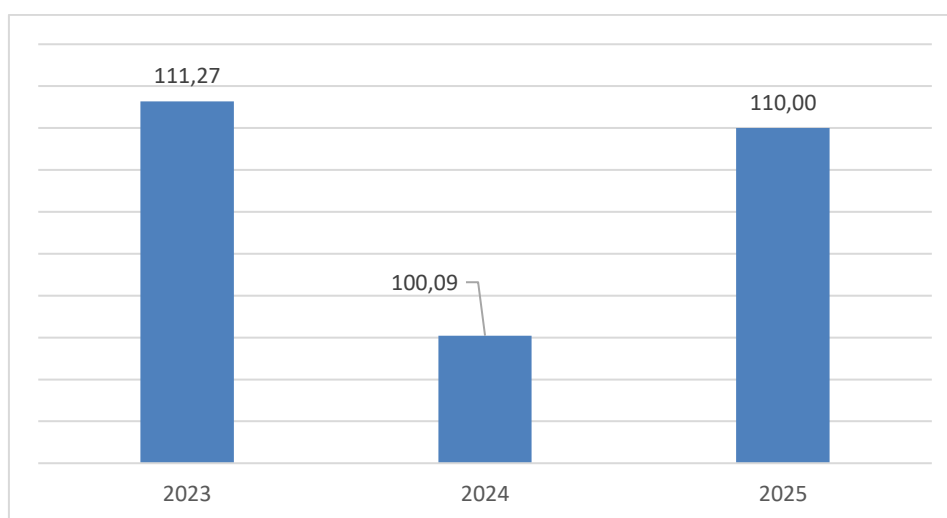
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik berada di bawah Kepala BPS berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setiap tahun. Laporan Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik tahun 2025 adalah wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan selama Tahun 2025.

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik bertugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025, visi BPS periode 2025–2029 adalah: "Lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Renstra BPS merupakan acuan bagi seluruh aparat BPS dalam menjalankan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan jangka panjang BPS, sekaligus mencapai tujuan pemerintah dalam lima tahun.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik memiliki dua sasaran strategis yang harus dicapai pada periode Renstra 2025-2029 dan diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Kedua sasaran strategis tersebut adalah 1) Peningkatan pemanfaatan data *insight* statistik lintas sektor yang berkualitas, dan 2) Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral kementerian/lembaga mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang berkualitas. Pencapaian kedua sasaran strategis diukur dengan IKU "Indikator tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor" untuk Sasaran Strategis ke-1 dan "Indikator persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra Deputy

Bidang Neraca Dan Analisis Statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral" untuk Sasaran Strategis ke-2.

Penyelenggaraan kegiatan di Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik tahun 2025 telah memenuhi target dengan nilai capaian kinerja diatas 100 persen yaitu 110,00 persen dan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) sebesar 94,50. Berdasarkan Permenpan RB No. 22 Tahun 2024, PKO tersebut mendapatkan predikat "Baik". Hal ini berarti tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Capaian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu melaksanakan Misi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dengan baik. Capaian kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik selama tiga tahun yaitu dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Perkembangan Capaian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2023-2025 (Persen)

Pencapaian kinerja sasaran tersebut menggunakan sumber daya anggaran sebesar 39,72 milyar rupiah dimana 99,70 persen anggaran dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis 1 yang mencapai 36,36 milyar rupiah. Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik telah melakukan upaya optimalisasi penyerapan anggaran dengan disertai penggunaan secara efektif dan akuntabel, namun tetap menjaga kualitas output neraca dan analisis statistik yang dihasilkan. Hal tersebut tecermin dalam nilai efisiensi anggaran. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila memiliki nilai efisiensi lebih dari 1 persen. Secara total, kegiatan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dapat dikatakan efisien karena memiliki nilai efisiensi sebesar 1,20. Hal ini sejalan dengan nilai efisiensi dari masing-

masing sasaran strategis yang berada di atas 1 persen. Sasaran strategis pertama adalah Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas memiliki efisiensi 1,31 sedangkan sasaran strategis kedua yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas memiliki efisiensi yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,49.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

# **Bab I. Pendahuluan**

## **1.1. Latar Belakang**

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPS menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yang dituangkan dalam rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan. Rencana kegiatan ini terangkum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No 4 Tahun 2025 tentang Renstra BPS 2025-2029, bertujuan agar menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik berada di bawah Kepala BPS berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun. Laporan Kinerja 2025 ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005;
- PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 adalah wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan selama Tahun 2025. Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dikerjakan, serta kinerja yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik selama tahun 2025;
2. Bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik pada masa yang akan datang;
3. Meningkatkan kepercayaan pengguna data terhadap data neraca nasional yang dihasilkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

## **1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Tugas:

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi dalam hal:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- c. Pelaksanaan pengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik; dan;
- d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, susunan organisasi Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari:

a. Deputy

Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas memimpin Deputy bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam menjalankan tugas dan fungsi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

b. Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Neraca Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyusunan neraca barang, neraca jasa, konsolidasi neraca produksi nasional dan konsolidasi neraca produksi regional.

c. Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Neraca Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba, neraca pemerintah dan badan usaha, neraca modal dan luar negeri, serta konsolidasi neraca pengeluaran.

d. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan analisis statistik, konsistensi statistik, indikator statistik, dan pengembangan model statistik.

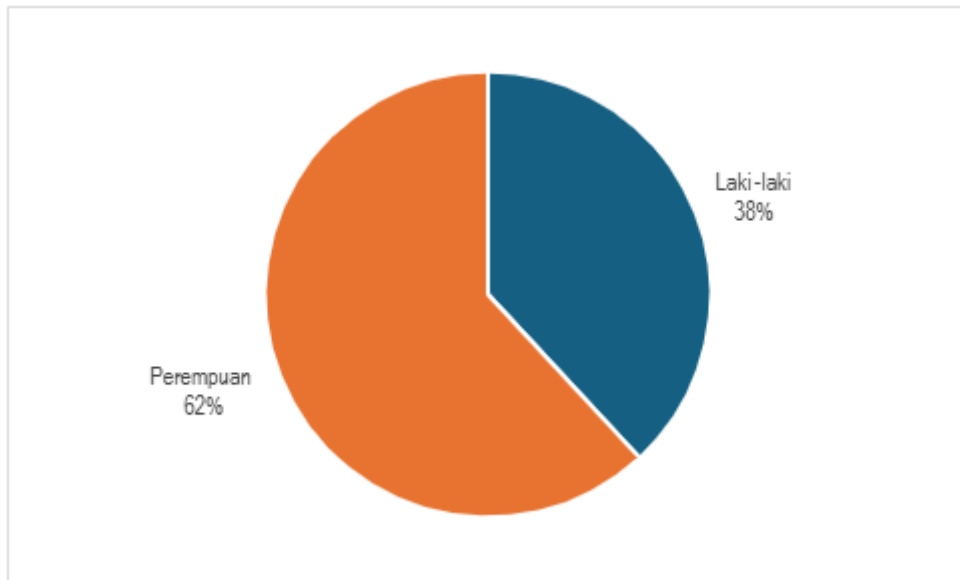
Secara rinci struktur organisasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdapat pada Lampiran 1.

### 1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

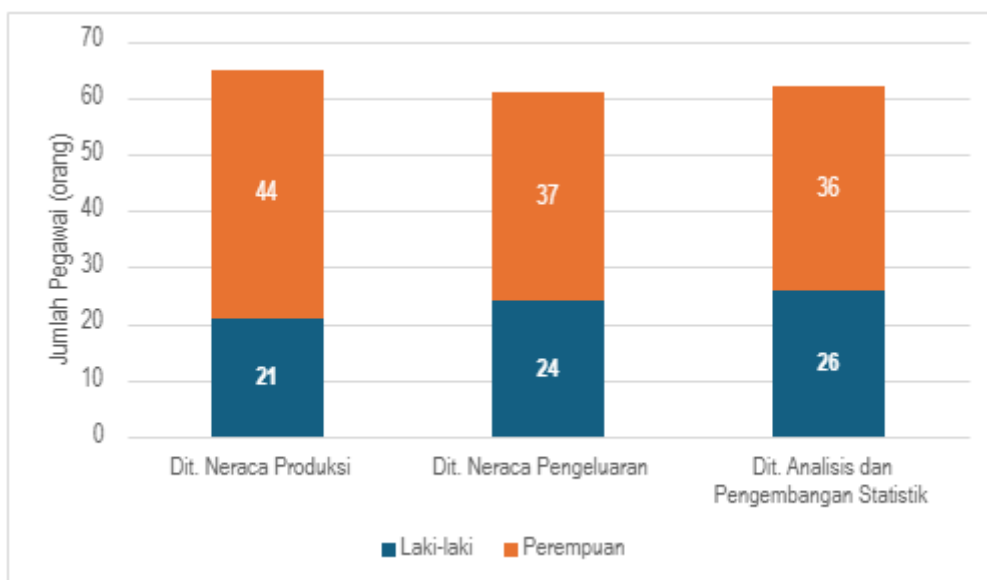
Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan aset penting bagi organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. SDM aparatur merupakan *human capital* bagi organisasi dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai target atau sasarannya. Selain itu, sejalan dengan dinamika perkembangan global di Era Revolusi Industri 4.0, serta dalam rangka mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, maka diperlukan SDM yang kompeten dan unggul.

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik sebagaimana kondisi data pada 31 Desember 2025, memiliki 189 orang pegawai, dengan komposisi 38,09 persen pegawai laki-laki dan 61,97 persen pegawai perempuan

(Gambar 2). Seluruh pegawai tersebut terdistribusi pada 3 direktorat, yaitu 65 orang pegawai di Direktorat Neraca Produksi, 61 orang di Direktorat Neraca Pengeluaran, dan 62 orang di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik sebagaimana tercantum dalam **Error! Reference source not found.**

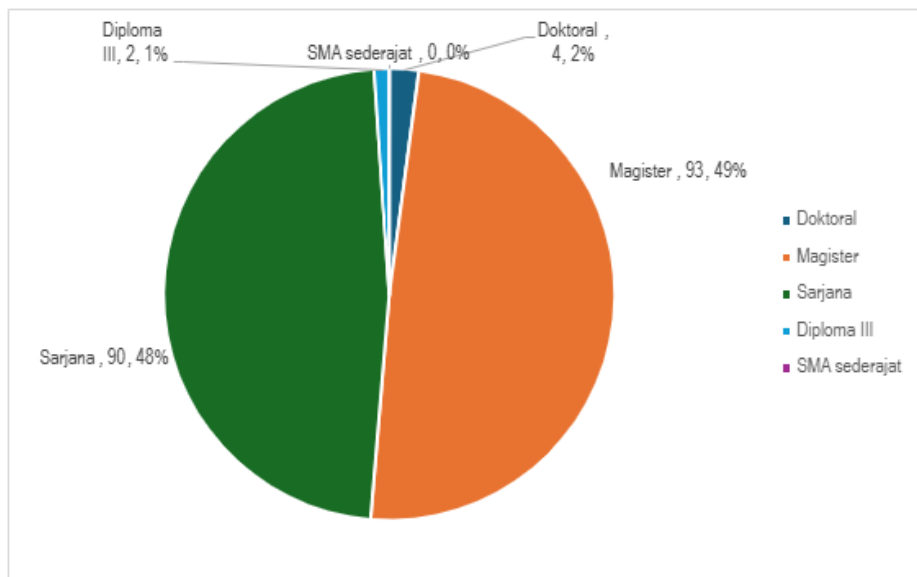


Gambar 2 Persentase Pegawai Deputi Bidang NAS menurut Jenis Kelamin (Persen), 2025



Gambar 3 Jumlah Pegawai Deputi Bidang NAS menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin (Orang), 2025

Selanjutnya, tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4. Dari gambar di bawah terlihat bahwa pegawai yang memiliki pendidikan Diploma III atau lebih rendah sebesar 1 persen, pendidikan Strata I (termasuk Diploma IV) sebesar 48 persen, pendidikan Strata II sebesar 49 persen, dan pendidikan Strata III sebesar 2 persen. Jadi, pegawai BPS di Deputy Bidang Neraca Analisis Statistik memiliki pendidikan Diploma IV/Strata I ke atas sebesar 99 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM pada Deputy Bidang NAS dapat dikatakan baik.



Gambar 4 Pegawai Deputy Bidang NAS menurut Tingkat Pendidikan (Persen), 2025

Dari sisi anggaran, untuk mencapai target kinerja pada tahun 2025, dialokasikan pagu awal anggaran sebesar Rp58.567.044.000. Pagu tersebut tercakup dalam pagu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu dan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899) Rp9.804.453.000 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran (2898) Rp8.377.331.000, serta Pengembangan dan Analisis Statistik (2896) Rp40.385.260.000. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai *self blocking* anggaran maka pagu yang dapat digunakan untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp39.717.226.000. Dan pada triwulan IV-2025, Deputy Bidang NAS mendapatkan tugas untuk melakukan Survei dan Monitoring Program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas sebesar Rp17.431.273.000 sehingga total anggaran dapat digunakan sampai dengan akhir 2025 adalah sebesar Rp57.148.499.000. Dari alokasi anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung kinerja dengan realisasi sebesar Rp49.921.985.955 atau mencapai 87,35 persen.

#### 1.4. Potensi dan Permasalahan

Data dan informasi statistik yang berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia. Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik selalu berupaya untuk menyajikan data neraca dan informasi statistik yang berkualitas demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal.

Deputi NAS terus berupaya untuk melakukan perbaikan secara kelembagaan, bersama-sama dengan tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS provinsi dan kabupaten/kota berusaha untuk menyajikan data neraca nasional dan informasi statistik yang berkualitas dan tepat waktu serta tercapainya pelayanan prima terhadap produk-produk neraca dan analisis statistik yang terpercaya untuk semua demi terwujudnya SSN yang andal. Deputi NAS juga telah melakukan implementasi *System of National Account* (SNA) 2008 yang merupakan kerangka kerja nasional dalam menjelaskan neraca ekonomi makro secara komprehensif, konsisten, serta terintegrasi dalam konsep definisi dan klasifikasi yang mengacu pada aturan neraca yang secara internasional disepakati meskipun belum diadopsi sepenuhnya (*full adopted*) dalam implementasi SNA 2008. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan ketersediaan beberapa jenis data yang masih belum tersedia atau belum memenuhi kebutuhan standar SNA 2008 secara lengkap.

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik berupaya terus menyajikan statistik neraca nasional dan analisis statistik lintas sektor yang berkualitas. Komitmen Deputy NAS tersebut terlihat pada tahun 2025, Deputy NAS memenuhi jadwal rilis data/publikasi yang terbit tepat waktu sesuai ARC. Berbagai data neraca dihasilkan oleh Deputy NAS menjadi primadona oleh pengambil kebijakan dan pengguna data untuk melakukan analisis ekonomi makro dan sosial yang lebih mendalam dan komprehensif. Beberapa publikasi/data yang rutin disediakan oleh Deputy Bidang NAS adalah Indikator Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, PDB dan PDRB Triwulanan, Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi, Neraca Arus Dana dan lain sebagainya. Selain publikasi yang rutin (ARC), pada tahun 2025 Deputy NAS telah berhasil rilis data secara tepat waktu yaitu Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia Tahun 2019-2023.

Selain itu, dalam rangka peningkatan penerapan rekomendasi dalam Sistem Neraca Nasional 2008, salah satu adopsi SNA 2008 tersebut adalah melakukan

penyusunan SUT secara berkala. SUT ini disusun dalam upaya melakukan kegiatan Perubahan Tahun Dasar (*Rebasing*) PDB/PDRB berbasis CVM yang tepat waktu (Penyusunan Aplikasi SUT dan Lembar Kerja dan Series PDB dan PDRB berbasis CVM). Pada tahun 2024 ini telah berhasil disusun SUT tahun 2019-2021 serta Tabel Input Output Tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2025, Deputy NAS menyusun Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis *SEEA*, Pengembangan *Tourism Satellite Account* (TSA) Indonesia, serta penyediaan PDB Satelit.

Mengingat tingginya kebutuhan akan data neraca dan analisis maka Deputy NAS dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas SDM-nya sehingga memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik untuk menyelesaikan berbagai tugas yang diemban. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, pelatihan-pelatihan teknis telah banyak dilakukan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar BPS, antara lain dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), kursus daring dari *United Nation Statistical Institute for Asia and the Pacific* (UNSIAP), *technical assistance* dari Australian Bureau Statistic (ABS) dan lembaga lainnya serta seminar-seminar dalam dan luar negeri lainnya. Deputy Neraca dan Analisis Statistik sering dijadikan sebagai rujukan *pilot study* pada level global. Hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi Deputy NAS. Mulai dari implementasi *System of National Account* (SNA) 2008, penyusunan *Annual Supply and Use Table*, penyusunan Neraca Institusi Terintegrasi (NIT) hingga berbagai kajian tentang *Small Area Estimation*, *Seasonal Adjustment* dan pemanfaatan *Big Data*, telah menjadi rujukan perstatistikan di internal BPS maupun eksternal hingga di tingkat internasional. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan pemanfaatan yang lebih luas.

*Response rate* dan ketepatan pemasukan survei-survei di bidang neraca harus tetap terjaga. Saat ini, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik masih memiliki berbagai survei khusus guna mencukupi kebutuhan data untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi triwulanan. Banyaknya jenis survei menjadi tantangan terbesar dalam menyediakan data, karena banyak konsep dan metodologi survei yang perlu dikawal oleh tim neraca wilayah dan analisis statistik di kabupaten/kota. Hal tersebut diperberat lagi oleh keengganan responden menjawab pertanyaan survei karena data yang ditanyakan adalah data ekonomi selain juga disebabkan oleh unit observasi tercacah untuk lebih dari satu survei. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga *response rate* tersebut, beberapa survei sudah menggunakan aplikasi FASIH dan perubahan proses bisnis dari PAPI menjadi CAPI maupun CAWI.

## 1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan yang dihadapi; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Visi dan Misi BPS, Target Kinerja tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dukungan BPS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan isu strategis nasional Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja organisasi, capaian kinerja terhadap renstra, capaian prioritas nasional dan prioritas presiden, dan isu strategis nasional, prestasi dan inovasi serta upaya efisiensi, dan realisasi anggaran
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.

## Bab II. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra). Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

### 2.1. Visi dan Misi, BPS

Mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029, **visi BPS periode 2025–2029** adalah:

**“Lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.**

Visi tersebut disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis kelembagaan BPS yang memengaruhi peran dan kedudukannya dalam penyediaan statistik resmi yang berkualitas guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, perumusan visi BPS selaras dengan arah kebijakan dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024–2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, yang dijabarkan melalui delapan misi /Asta Cita dan 17 Program Prioritas. Dalam visi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjadi lembaga statistik yang dijelaskan dalam Gambar 5.

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan. Cakupan independensi ini meliputi hak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, kebebasan dalam menentukan metodologi statistik yang merujuk pada standar internasional, serta kebebasan dalam menentukan jadwal publikasi data. Dengan independensi yang terjaga, BPS dapat membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan menyediakan data yang

dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel.



Gambar 5 Penjelasan Visi BPS 2025-2029

Sumber: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025

Sebagai lembaga yang terpercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, BPS dapat berperan sebagai pilar utama dalam Sistem Statistik Nasional.

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku

kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, BPS dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan visinya sebagai lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, BPS menetapkan **3 (tiga)** misi utama berikut:

**1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan**

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan *insight* yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu .

**2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai pusat koordinasi dan pembina statistik di Indonesia melalui SSN yang andal dan terintegrasi. Dengan memperkuat kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan.

**3. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Statistik yang Efektif dan Efisien**

Misi ketiga ini diperlukan untuk keberhasilan Misi 1 dan Misi 2, sehingga BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir.

## **2.2. Target Kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025-2029**

Perancangan kinerja untuk seluruh unit kerja di BPS mengacu pada Rencana Strategis BPS Tahun 2025-2029. Renstra BPS merupakan acuan bagi seluruh aparat BPS dalam menjalankan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan jangka panjang

BPS, sekaligus mencapai tujuan pemerintah dalam lima tahun. Renstra BPS dapat digunakan sebagai dasar bagi BPS dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral oleh lembaga pemerintah lain dan penyelenggaraan statistik khusus oleh lembaga non-pemerintah. Renstra tersebut merupakan sumber informasi bagi para pengguna data dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan BPS dalam periode 2025-2029.

Secara lebih spesifik, perancangan kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik mengacu pada Renstra BPS Tahun 2025-2029. Selain itu, penggunaan Renstra ini merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik agar lebih terarah, efektif, dan efisien. Adapun kegiatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025 untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi
- b. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran
- c. Pengembangan dan Analisis Statistik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2025–2029, BPS menetapkan tiga tujuan dan tiga sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program BPS. Tiga tujuan tersebut antara lain;

1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan *insight* yang relevan.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

Sementara sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Dari 3 (tiga) tujuan dan sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik mendapatkan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan pertama dan kedua, yaitu mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan *insight* yang relevan dan mewujudkan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian di level lembaga, setiap tujuan dan sasaran strategis diukur melalui indikator kinerja sasaran strategis. Di level unit kerja Eselon I, sasaran strategis diturunkan menjadi sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan diukur melalui indikator kinerja sasaran kegiatan. Adapun sasaran, indikator kinerja, satuan, dan target kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik tahun 2025-2029 pada Tabel 1.

Tabel 1 Sasaran, Indikator Kinerja, Satuan, dan Target Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan pemanfaatan data <i>insight</i> statistik Lintas Sektor yang berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor	Persen	78,60	78,64	78,69	78,74	78,79
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas	Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Persen	19,84	26,73	26,73	40,29	40,29

### 2.3. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik merupakan komitmen kinerja antara Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dengan Kepala Badan Pusat Statistik dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Untuk memperkuat komitmen pencapaian kinerja, pada awal tahun ditetapkan target kinerja tahun 2025 untuk setiap indikator kinerja dari tujuan dan sasaran kegiatan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Target kinerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian visi Badan Pusat Statistik sebagai lembaga penyedia data statistik yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja ini, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh target kinerja yang telah disepakati serta siap mempertanggungjawabkan hasilnya sebagai bagian dari kontribusi BPS dalam mendukung pembangunan nasional berbasis data statistik. Perjanjian kinerja awal yang menjadi tanggung jawab unit kerja Deputy NAS ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan pemanfaatan data <i>insight</i> statistik Lintas Sektor yang berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor	Persen	78,60
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas	Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Persen	19,84

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik kepada Kepala BPS atas penggunaan anggaran Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

## **2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025**

### **2.4.1 Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektor**

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai Pembina Statistik Sektoral untuk 18 kementerian/lembaga, yaitu: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi dan Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan

Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tim PSS Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan teknis maupun non-teknis kepada 18 kementerian/lembaga. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian asistensi dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral, penyusunan rancangan kegiatan statistik, pengusulan standar data statistik, dan penyusunan metadata statistik. Selain itu, Tim PSS Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik juga memberikan penguatan kapasitas penyelenggara statistik sektoral dalam hal penjaminan kualitas statistik, penyajian analisis, visualisasi data, dan penyampaian insight. Upaya ini dilakukan untuk memastikan data statistik sektoral yang dihasilkan Kementerian/Lembaga memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan standar kualitas yang ditetapkan, sehingga selaras dengan standar statistik nasional serta mendukung keterpaduan dan integrasi data dalam Sistem Statistik Nasional.

#### **2.4.2 Prioritas Nasional: Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi**

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik melalui Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan, antara lain melalui mekanisme *Quality Gates* kepada penanggung jawab kegiatan statistik yang mendukung pengendalian inflasi, khususnya Direktorat Statistik Harga, serta pendampingan penyusunan dan penerapan *Quality Gates* pada kegiatan statistik terkait. Upaya tersebut bertujuan untuk mendukung tersedianya data statistik yang berkualitas, akurat, dan andal sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah penerapan *Quality Gates* pada sejumlah kegiatan statistik, meliputi Susenas 2025, Gladi Bersih SE2026, Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahunan 2025, Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2025, Survei Harga Konsumen 2025, Survei Khusus Neraca Produksi 2025, Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori 2025, serta Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga 2025.

Sejalan dengan upaya penjaminan kualitas data statistik pendukung inflasi tersebut, proses penghitungan IHK, inflasi dan andil inflasi pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 150 kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme harmonisasi dan rekonsiliasi antar level harga untuk menjaga konsistensi, integritas dan validitas output yang dihasilkan. Di samping itu, penguatan infrastruktur pendukung terus dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan instrumen pengumpulan data berbasis aplikasi FASIH serta penyempurnaan

instrumen diseminasi guna mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi. Penjaminan kualitas dilaksanakan secara konsisten melalui evaluasi internal berupa rapat evaluasi dan penerapan *Quality Gate* serta evaluasi eksternal melalui mekanisme SIQAF sehingga proses dan output statistik yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

#### **2.4.3 Prioritas Nasional: Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi**

Kegiatan Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi mendukung Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan Tata Kelola Data serta Pengembangan dan Pemanfaatan *Emerging Technology*. Penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik yang memanfaatkan *Big Data* untuk statistik resmi selama periode 2025–2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata seperti: Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti *commuter*, dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (*Metropolitan Statistical Area*—MSA). Dalam hal ini, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik melalui Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik memiliki peranan untuk melakukan pengadaan koneksi mediasi data MPD yang diperlukan untuk menghasilkan statistik pariwisata seperti Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti *commuter* dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (*Metropolitan Statistical Area*—MSA).

#### **2.4.4 Prioritas Presiden: Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional**

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan integrasi dan harmonisasi data sosial dan ekonomi yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik melalui Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik melaksanakan aktivitas berupa pendampingan kepada Tim Perban DTSEN dalam penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN, khususnya pada aspek penjaminan kualitas data, yang menghasilkan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN sebagai output utama dan landasan pengaturan implementasi DTSEN.

#### 2.4.5 Prioritas Presiden: Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik melalui Direktorat Neraca Produksi berperan strategis dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dengan menempatkan Direktur Neraca Produksi sebagai Ketua Pelaksana kegiatan. Dalam peran ini, Direktorat Neraca Produksi juga bertanggung jawab atas pengendalian umum, koordinasi lintas unit, serta memastikan pelaksanaan survei berjalan selaras dengan tujuan dan kebutuhan kebijakan. Direktorat Neraca Produksi bersama dengan tim dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial juga menjadi penanggung jawab teknis survei, mulai dari perencanaan, perumusan metodologi, desain instrumen, hingga pengendalian kualitas data, sehingga survei monitoring MBG dapat menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu melalui Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik berperan melaksanakan dukungan teknis dan analitis dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, melalui serangkaian aktivitas yang mencakup mereviu kuesioner, penyusunan rule validasi dan LK *Quality Gates*, penyusunan bahan ajar, penyusunan rancangan tabulasi anomali dan analisis, serta pengolahan data hasil pendataan Survei MBG Tahap I guna memastikan kualitas, konsistensi, dan kesiapan data untuk kebutuhan analisis dan pengambilan kebijakan.

Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), *Supplier* (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei *Baseline* adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG

dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei *Baseline* pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan *web monitoring* melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

#### **2.4.6 Isu Strategis Nasional: Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca**

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

Pada tahap pengukuran, dilakukan perhitungan neraca arus energi dan emisi GRK menurut lapangan usaha dan komponen konsumsi akhir. Penyusunan indikator turunan dari neraca terkait seperti bauran energi terbarukan dalam konsumsi akhir, intensitas energi, serta emisi dan intensitas emisi GRK. Pada tahap diseminasi hasil dilakukan baik kepada pemangku kepentingan nasional maupun internasional. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi kinerja berupa penyusunan publikasi resmi Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut meliputi rapat atau diskusi, *dataset* neraca arus dan neraca emisi GRK Indonesia tahun 2019–2023, indikator inti berupa intensitas energi dan intensitas emisi GRK, serta publikasi resmi BPS berjudul Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia 2019–2023 yang dirilis pada Juni 2025. Selain itu kita juga mendukung *Global Data Collection* terkait Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia yang dinaungi oleh United Nation Statistics Division (UNSD). Data emisi GRK perkapita

juga berkontribusi dalam pengisian kuesioner BRICS. Output ini menjadi dasar penting dalam penyediaan data lingkungan strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Output Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi juga berkontribusi dalam pemenuhan rekomendasi DGI fase 3 untuk rekomendasi 1 dan 2. BPS diundang dalam beberapa pertemuan DGI sebagai pembicara seperti G20 DGI- 3 Webinar: *Closing Data Gaps to Better Understand Energy Supply and Use* pada 2 Juni 2025 dan G20 DGI-3 *Global Conference* pada tanggal 17 Juni 2025 untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi di Indonesia.

## 2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana kerja serta kebutuhan biaya program/kegiatan suatu instansi pemerintah. RKA disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan sasaran dan indikator kinerja, sekaligus sebagai dasar pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis mendukung salah satu dari program pokok BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

- Kegiatan 2896: Pengembangan dan Analisis Statistik yang diampu oleh Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
- Kegiatan 2898: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran yang diampu oleh Direktorat Neraca Pengeluaran
- Kegiatan 2899: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi yang diampu oleh Direktorat Neraca Produksi

Pemetaan anggaran menurut sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas terdiri atas program:
  - 1) 2896.BMA.U01 Publikasi/ laporan indeks pembangunan manusia
  - 2) 2896.BMA.004 Publikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik
  - 3) 2896.QMA.006 Pemanfaatan *big data* untuk statistik resmi
  - 4) 2898.BMA.007 Publikasi/laporan statistik neraca pengeluaran
  - 5) 2899.BMA.006 Publikasi/laporan neraca produksi
  - 6) 2899.BMA.009 Publikasi/ laporan neraca satelit pariwisata nasional (TSA)
- Sasaran 2: Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas terdiri atas program:

- 1) 2896.BDB.100 Pembinaan statistik sektoral pengembangan dan analisis
- 2) 2898.BDB.100 Pembinaan statistik sektoral neraca pengeluaran
- 3) 2899.BDB.100 Pembinaan statistik sektoral neraca produksi

Tabel 3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Kegiatan	PAGU Awal (Rp)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Persentase PAGU yang dapat digunakan terhadap Pagu Awal (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2896.Pengembangan dan Analisis Statistik	40.385.260.000	34.875.457.000	86,36
2	2898.Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	8.377.331.000	1.556.549.000	18,58
3	2899.Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	9.804.453.000	3.285.220.000	33,51
Total		58.567.044.000	39.717.226.000	67,81

Pada awal tahun 2025, pagu program PPIS Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang tersedia berdasarkan alokasi anggaran BPS adalah sebesar Rp58.567.044.000 yang mana angka tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan serta pelaksanaan anggaran secara lebih selektif, dengan mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan prioritas program yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan. Penyesuaian tersebut berimplikasi pada berkurangnya pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan. Dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah maka pagu yang dapat digunakan menjadi Rp39.717.226.000 atau sebesar 67,81 persen dari pagu awal.



### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik merupakan perwujudan kewajiban Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik selama tahun 2025 disajikan dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025.

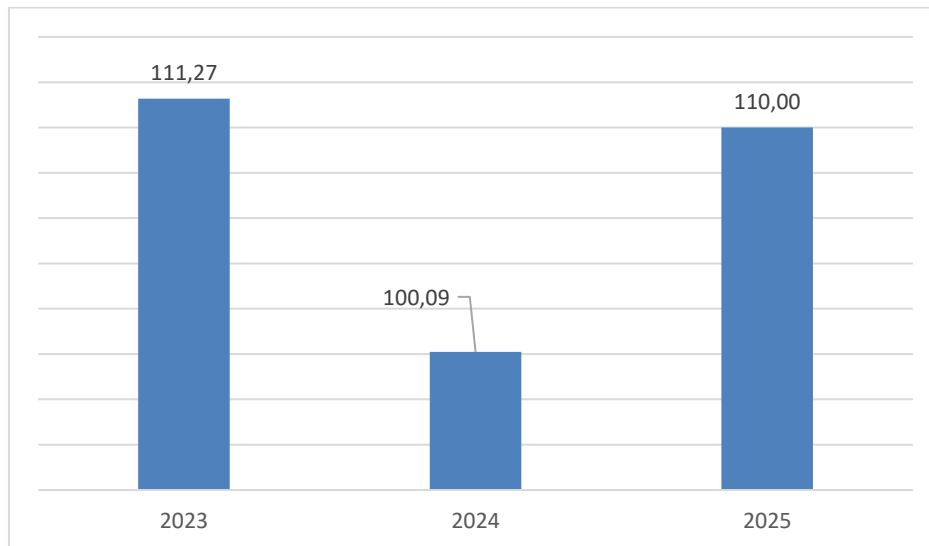
Pada bagian ini akan diuraikan hasil capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang telah diambil. Laporan Kinerja ini juga menyajikan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk tentang upaya efisiensi yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja tersebut. Tidak hanya itu, bagian ini juga menyajikan bentuk-bentuk prestasi dan inovasi yang dihasilkan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik selama tahun 2025.

Capaian kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik tahun 2025-2029 untuk mencapai dua tujuan yaitu (1) Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan dan (2) Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien. Dengan sasaran strategis adalah (1) Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas (2) Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas. Pencapaian kedua sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjabaran IKU untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut:

- Sasaran 1 diukur dengan indikator tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor
- Sasaran 2 diukur dengan indikator persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra deputy bidang neraca dan analisis statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral

### 3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025

Capaian kinerja merupakan representasi dari Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam mencapai dua sasaran strategis yang diukur dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan targetnya pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Kemajuan capaian kinerja dapat diukur dengan membandingkan capaian antar tahun berdasarkan selisih realisasi antar tahun.



Gambar 6 Perkembangan Capaian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2023-2025 (Persen)

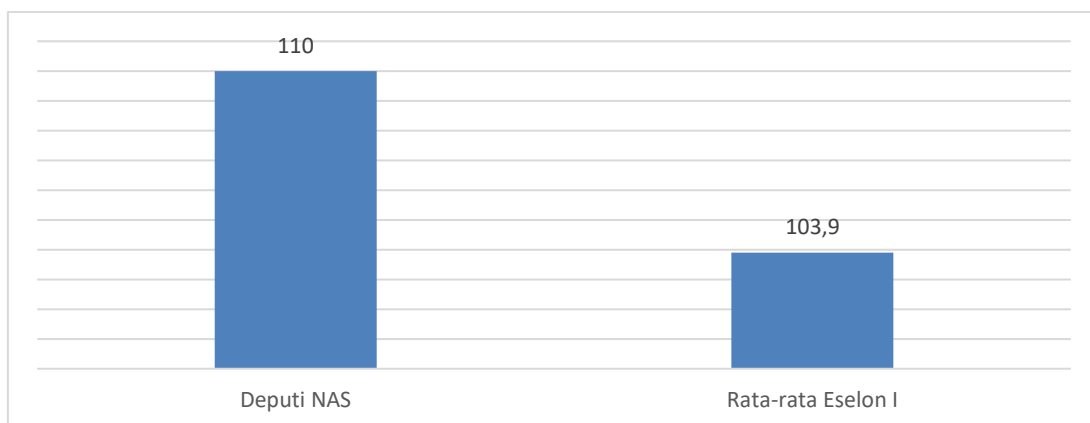
Selama tahun 2023-2025, capaian kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik bergerak fluktuatif, meskipun begitu, setiap tahun Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik berhasil mencapai kinerja diatas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai berhasil melebihi target kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini, Capaian kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik telah memenuhi target dengan nilai capaian kinerja sebesar 110,00 persen. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2024 yang sebesar 100,09 persen namun lebih rendah jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 111,27 persen. Meskipun demikian, capaian kinerja selama 2023-2025 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan sekaligus telah mampu

melaksanakan Misi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dengan baik. Capaian kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 6 diatas.

Predikat Kinerja Organisasi (PKO) didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian program atau kegiatan organisasi yang diklasifikasikan ke dalam lima predikat yaitu Istimewa, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang. Komponen utama PKO terdiri dari capaian perjanjian kinerja dan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai PKO Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik tahun 2025 adalah sebesar 94,50. Berdasarkan Permenpan RB No. 22 Tahun 2024, PKO tersebut mendapatkan predikat Baik. Hal ini berarti tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Predikat PKO		Interpretasi Predikat PKO	
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO	Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
$X > 100\%$	ISTIMEWA	ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK	BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN	BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG	KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

Gambar 7 Predikat dan Interpretasi PKO berdasarkan Permenpan RB No. 22 Tahun 2024



Gambar 8 Perbandingan Capaian Kinerja Antar Eselon I Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 8 di atas, Deputy Bidang Neraca dan Analisis memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon I. Berdasarkan hasil tersebut, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025 ini terutama dalam mencapai tujuan kesatu, sasaran strategis kesatu yaitu peningkatan pemanfaatan data dan insight statistik lintas sektor yang berkualitas melalui meningkatkan kualitas data melalui koordinasi dengan para penyedia data maupun stakeholder sehingga data yang dihasilkan semakin meningkat kualitasnya, tersedia tepat waktu dan dipahami oleh pengguna data.

Deputy Bidang Statistik Neraca dan Analisis Statistik memiliki 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis, dan 2 (dua) indikator kinerja utama. Penghitungan capaian kinerja tahun 2025 telah memperhitungkan indikator kinerja pada tujuan dan sasaran strategis. Adapun kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam periode Renstra 2025-2029. Secara lengkap, capaian kinerja dari setiap indikator kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik pada tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025 <sup>*)</sup>	2023	2024	2025 <sup>*)</sup>	2023	2024	2025 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
T1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan										
SS 1.1 Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas										
1.1.1 Tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	78,60	N/A (Belum dijadikan indikator)	96,30	N/A (Belum dijadikan indikator)	120,00			
T2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien										
SS 2.1 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas										
1.1.2 Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra deputy bidang neraca dan analisis statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	19,84	N/A (Belum dijadikan indikator)	19,84	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00			

\*)Target 2025 diambil dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025

## **T1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan**

Pembangunan statistik menuntut Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik neraca nasional dan analisis statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengguna data menginginkan data dapat tersedia dengan lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*).

Upaya pengembangan yang dilakukan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengumpulkan data makro dan data mikro, BPS mempunyai konsumen utama berupa Kementerian/Lembaga dan dunia usaha serta masyarakat. Data tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta rencana pembangunan. Hal ini menuntut BPS untuk terus meningkatkan kualitas data statistik terutama dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan oleh pemerintah.

Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik berupaya menyediakan data statistik neraca nasional dan analisis statistik yang berkualitas. Sebagai wujud nyata peningkatan kualitas data statistik tersebut, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik menuangkan ke dalam Tujuan Strategis pertama yaitu mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan *insight* yang relevan. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik neraca nasional dan analisis statistik yang berkualitas.

### **SS.1.1 Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas**

Sasaran strategis pertama berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan *insight* atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia statistik lintas sektor yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indikator kinerja sasaran strategis atau indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Tujuan 1 dan sasaran strategis 1 yaitu

Tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 diatas, pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis kesatu dengan capaian yang sangat baik yaitu mencapai 120,00 persen sedangkan capaian kinerja sasaran strategis kedua mencapai 100 persen.

### **Tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor**

Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor adalah indikator yang mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang relevan dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, atau evaluasi kebijakan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan lembaga dalam menjadikan data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik.

Pengukuran indikator ini bersumber dari Penilaian mandiri terhadap dokumen pemerintah dan Survei khusus yang dilaksanakan untuk mengukur pemanfaatan data oleh pengguna data yang dilakukan oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Survei khusus ini dilakukan dengan sampel konsumen data yang berasal dari K/L/D/I yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS baik secara luring maupun daring.

Pada tahun 2025, target indikator tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 78,60 Persen. Realisasi capaian kinerja indikator tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor tahun 2025 mencapai 96,30% dan telah melampaui target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 120,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa data neraca dan analisis statistik yang dihasilkan Deputi Bidang NAS hampir seluruhnya digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional oleh K/L/D/I.

Meskipun capaian indikator sudah tercapai dengan baik, namun terdapat kendala dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran ini yaitu ketersediaan data pendukung untuk menyusun indikator baik dari internal maupun eksternal BPS terkadang terlambat dari target yang ditentukan. Untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan para penyedia data (internal dan eksternal BPS). Potensi rencana tindak lanjut di tahun mendatang yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para *stake holder* melalui surat resmi permintaan data secara kelembagaan. Kendala lain adalah perlu dilakukan peningkatan akurasi terjemahan dan penyuntingan struktur kalimat agar sesuai dengan standar publikasi dalam penyusunan publikasi bilingual, proses penyuntingan publikasi yang masih manual mengurangi kerapihan dan tata letak tulisan. Untuk itu diperlukan penggunaan aplikasi yang membantu meningkatkan akurasi

terjemahan dan penyuntingan kalimat dalam publikasi agar sesuai standar, pemanfaatan perangkat lunak termutakhir selain Microsoft Word untuk meningkatkan kerapihan dan mempermudah penataletakan tulisan. Tantangan lain yang dihadapi adalah jadwal rilis publikasi yang berdekatan perlu dikelola lebih lanjut. Untuk itu, pengelolaan tim kerja dan jadwal rilis perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana perangkat lunak/keras teknologi informasi (TI) tidak memadai untuk kegiatan pengolahan data regional (provinsi/kabupaten/kota) sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengadaan perangkat lunak/keras TI untuk mendukung pekerjaan berjalan dengan lebih baik dan cepat.

## **T2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien**

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *better, faster, and cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Tujuan kedua Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik ditetapkan dalam rangka mendukung peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung Pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik juga menyatakan bahwa BPS bertugas sebagai pembina statistik untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.

### **SS.2.1 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas**

Sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan kedua adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas”. Dengan sasaran strategis tersebut maka arah kebijakan untuk mendukung sasaran ini adalah dengan melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam menghasilkan statistik. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan satu indikator kinerja yaitu “Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra deputi bidang neraca dan analisis statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral”.

#### **Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra deputi bidang neraca dan analisis statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I. Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan pertumbuhan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Unit Kerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari tahun dasar (tahun 2023). Indikator ini menggambarkan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dari K/L Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik. K/L Mitra Deputi Neraca dan Analisis Statistik adalah seluruh K/L Mitra Direktorat di lingkup Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang ditentukan oleh Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral.

Pembinaan statistik sektoral untuk K/L/D/I merupakan amanat Undang Undang No 19 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana BPS memiliki peran sebagai Pembina Data Statistik Sektoral. Tugas yang dilakukan sebagai pembina data adalah menetapkan standar data, menetapkan struktur dan format baku metadata, memberikan rekomendasi, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pada tahun 2025, tidak dilakukan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral (EPSS) sehingga target yang ditetapkan menggunakan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 19,84 persen. Deputi NAS berhasil menuntaskan indikator kinerja sasaran ini dengan capaian sebesar 100 persen. Secara umum, tidak ada kendala terkait nilai IPS karena tidak ada penyelenggaraan EPSS pada tahun 2025. Meskipun demikian, pembinaan statistik sektoral pada K/L yang menjadi lokus pembinaan tetap dilakukan dan koordinasi antara Tim PSS Direktorat dengan Sekretariat PSS juga terus terjalin. Kendala lain yang dihadapi dalam pembinaan statistik sektoral adalah masih terdapat K/L yang tidak

memiliki walidata dan pelaksanaan pembinaan hanya secara daring. Untuk itu, tim tetap melakukan komunikasi dengan K/L (baik melalui walidata maupun pejabat yang ditunjuk) agar dapat melaksanakan pembinaan dan berupaya dapat melakukan pembinaan secara luring.

Pada tahun 2025, tercatat ada 18 K/L mitra yang mendapat pembinaan statistik. Beberapa K/L/D/I yang telah dibina pada tahun 2025 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi dan Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Adapun yang menjadi kendala selama tahun 2025 adalah terdapat K/L yang tidak memiliki walidata (seperti: BUMN, BNPP, MA, Lemhanas, BNPT) dan pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan secara daring memiliki kelemahan, yaitu peserta K/L cenderung kurang fokus dalam menyerap dan kurang berinteraksi secara aktif. Hal ini memengaruhi tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta. Sehingga solusi yang dilakukan adalah tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pejabat yang ditunjuk/walidata sementara, dan melakukan pembinaan secara *offline*. Karena pembinaan yang dilakukan secara *offline* agar semua peserta dapat lebih fokus, mendapatkan pemahaman yang lebih baik, dan dapat berpartisipasi secara aktif pada kegiatan pembinaan. Sehingga, untuk kedepannya, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dan pendekatan persuasif ke K/L lokus binaan agar bersedia berperan aktif dalam PSS serta melanjutkan aktivitas kegiatan pembinaan PSS.

### **3.3 Capaian Kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Terhadap Renstra**

Rencana Strategis menyajikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS yang di *breakdown* ke dalam periode jangka menengah lima tahunan. Dokumen renstra BPS tertuang dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. Kinerja selama lima tahun tersebut dievaluasi setiap tahunnya untuk melihat perkembangan kinerja dan memproyeksikan keberhasilan pencapaian target di akhir Renstra di tahun 2029. Penyampaian target

renstra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik disampaikan melalui surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal: Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU.

Secara umum target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik sejalan target Renstra tahun 2025-2029 yang tertuang dalam kedua dokumen tersebut. Indikator tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor ditargetkan tercapai 78,60 persen pada tahun 2025 dan 79,79 persen pada tahun 2029. Realisasi indikator ini pada tahun 2025 mencapai 96,30 persen dengan capaian 120 Persen terhadap target 2025 sedangkan realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2029 mencapai 120 persen. Realisasi capaian 2025 yang lebih tinggi dibandingkan target tahun selanjutnya termasuk tahun 2029 dipandang perlu untuk dilakukan revaluasi target kinerja dalam rangka menjaga kualitas layanan yang telah dicapai.

Indikator persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra deputy bidang neraca dan analisis statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral memiliki target kinerja sebesar 19,84 Persen pada tahun 2025 dan 40,29 persen pada tahun 2029. Dikarenakan tahun 2025 tidak dilaksanakan EPSS, maka rata-rata nilai IPS K/L mitra Deputy Neraca dan Analisis Statistik tidak berubah sehingga capaian indikator ini terhadap target 2025 adalah 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2029 maka capaian indikator ini adalah sebesar 49,24 persen.

Tabel 5 Capaian Kinerja Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik terhadap Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
<b>Sasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas</b>						
Tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor	Persen	78,60	79,79	96,30	120,00	120
<b>Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas</b>						
Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra deputy bidang neraca dan analisis statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Persen	19,84	40,29	19,84	100,00	49,24

\*) Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025, hal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU

Faktor yang mendorong ketercapaian target kinerja secara umum adalah adanya kepemimpinan yang efektif yang didukung SDM yang kompeten sesuai tugasnya dan optimalisasi teknologi. Koordinasi dan kolaborasi yang solid, disertai monitoring dan evaluasi berkala, memastikan proses berjalan lancar dan responsif terhadap kendala. Selain itu, pemanfaatan teknologi dengan optimal turut mendukung efisiensi penyelesaian pekerjaan. Semua hal tersebut menjadi pendorong penting dalam menghasilkan output yang akurat, konsisten, dan tepat waktu.

### **3.4 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025**

#### **3.4.1 Capaian Prioritas Nasional**

##### **1. Pembinaan Statistik Sektoral**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanahkan BPS untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Salah satu fokus pembinaan tersebut adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) melalui program Pembinaan Statistik Sektoral.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, BPS berperan mendukung Prioritas Nasional, khususnya Agenda Transformasi Tata Kelola melalui Proyek Prioritas Penyediaan Data Pembangunan. Salah satu output prioritas BPS adalah Pembinaan Statistik Sektoral.

Pembinaan Statistik Sektoral merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi antara BPS dan K/L/Pemda untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi penyelenggara statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta menghasilkan statistik sektoral yang berkualitas.

Pelaksanaan pembinaan tahun 2025 dilakukan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral BPS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 200 Tahun 2025. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik memiliki 18 kementerian/lembaga mitra, yaitu: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi dan Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tim PSS Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan teknis maupun non-teknis kepada 18 kementerian/lembaga.

Adapun output dari pelaksanaan peran tersebut adalah terlaksananya pembinaan statistik sektoral pada 18 kementerian mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang terdokumentasi dalam Laporan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan statistik sektoral antara lain disebabkan oleh padatnya jadwal kegiatan, baik dari pihak kementerian/lembaga maupun pembina BPS, sehingga beberapa rencana kerja pembinaan tidak dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, kementerian/lembaga yang menjadi lokus binaan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik sebagian besar merupakan kementerian baru dengan diantaranya terdapat instansi yang masih berfokus pada proses penataan dan reorganisasi internal, sehingga pelaksanaan pembinaan statistik sektoral harus ditunda. Di sisi lain, pembinaan yang dilaksanakan secara daring juga menghadapi keterbatasan, yaitu peserta cenderung kurang fokus dan kurang aktif berinteraksi selama kegiatan berlangsung, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas penyampaian materi dan pencapaian tujuan pembinaan.

Solusi yang dilakukan atas kendala yang dihadapi meliputi penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyesuaian jadwal pembinaan, serta melakukan pembinaan statistik sektoral secara *offline* (yang memungkinkan) dan menyelenggarakan Workshop Evaluasi PSS secara *offline*. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah penguatan koordinasi awal dengan kementerian/lembaga mitra untuk menyepakati jadwal dan ruang lingkup pembinaan, serta optimalisasi pemanfaatan metode pembinaan yang lebih efektif yang didukung dengan materi pembinaan yang lebih terarah dan kontekstual.

## **2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi**

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik melalui Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan, antara lain melalui mekanisme *Quality Gates* kepada

penanggung jawab kegiatan statistik yang mendukung pengendalian inflasi, khususnya Direktorat Statistik Harga, serta pendampingan penyusunan dan penerapan *Quality Gates* pada kegiatan statistik terkait. Upaya tersebut bertujuan untuk mendukung tersedianya data statistik yang berkualitas, akurat, dan andal sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah penerapan *Quality Gates* Survei Harga Konsumen 2025.

Dalam penerapan *Quality Gate* terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama yang terkait dengan aspek sistem dan aspek koordinasi. Kendala-kendala tersebut antara lain:

#### Aspek Sistem

1. Kesulitan akses ke laman QGate akibat keterbatasan VPN dan isu teknis pascamigrasi sistem
2. Notifikasi pengisian *Quality Gate* kepada operator melalui email BPS belum berjalan efektif, sehingga masih terdapat keterlambatan pengisian pelaksana aksi, pengunggahan bukti dukung, maupun penilaian ukuran kualitas.
3. Keterbatasan kapasitas unggah bukti dukung

#### Aspek Koordinasi

1. Keterlambatan proses approval oleh pejabat penandatanganan
2. Adanya perubahan admin/operator QG tanpa disertai proses alih pengetahuan atau *knowledge sharing* dari petugas sebelumnya ke petugas pengganti
3. Keterlambatan pengisian QG di daerah akibat keterbatasan SDM

Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pengisian, kelengkapan bukti dukung, dan kelancaran proses penjaminan kualitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi *Quality Gate* ke depan.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala tersebut, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik telah merumuskan sejumlah langkah penanganan atau solusi, antara lain:

#### • Aspek Sistem

1. Penguatan sistem notifikasi melalui pembangunan *Dashboard* Monitoring QG

2. Penyempurnaan *website Quality Gate* dengan menambahkan informasi linimasa pengisian QG pada halaman utama aplikasi QGate
- Aspek Koordinasi
    1. Melakukan internalisasi penjaminan kualitas melalui *Quality Gate*, termasuk di level pimpinan
    2. Memberikan kewajiban setiap Admin QG untuk melakukan *knowledge sharing* di unit kerjanya masing-masing

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah pembangunan sistem baru yang telah terintegrasi dengan aplikasi manajemen risiko dan aplikasi pengukuran kualitas kegiatan statistik, peningkatan stabilitas dan performa aplikasi untuk meminimalkan kendala teknis, seperti penambahan kapasitas unggah file bukti dukung, pengintegrasian aplikasi QG dengan aplikasi pengukuran kualitas, pembangunan sistem notifikasi dan monitoring yang lebih efektif, serta penguatan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan di tingkat pusat dan provinsi guna memastikan konsistensi implementasi QG.

### 3. Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi

Kegiatan Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi mendukung Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan Tata Kelola Data serta Pengembangan dan Pemanfaatan *Emerging Technology*. Penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik yang memanfaatkan *Big Data* untuk statistik resmi selama periode 2025–2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata seperti: Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti *commuter*, dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (*Metropolitan Statistical Area*-MSA). Dalam hal ini, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik melalui Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik memiliki peranan untuk melakukan pengadaan koneksi mediasi data MPD yang diperlukan untuk menghasilkan statistik pariwisata seperti Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti *commuter* dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (*Metropolitan Statistical Area*—MSA).

Kendala yang dihadapi selama pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan BPS tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN antara lain dinamika perubahan muatan dan cakupan pengaturan yang cukup tinggi, sehingga substansi pasal yang mengatur penjaminan kualitas DTSEN perlu terus disesuaikan. Kondisi ini berdampak pada perlunya penelaahan dan penyempurnaan berulang.

Solusi yang dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi intensif dengan tim penyusun Rancangan Peraturan BPS dengan terlibat aktif pada setiap rapat pembahasan Perban DTSEN. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan setiap perubahan substansi dapat segera direspons dan diakomodasi ke dalam pasal-pasal maupun pengaturan yang berkaitan dengan penjaminan kualitas DTSEN secara tepat dan konsisten. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah tetap membuka ruang koordinasi dan siap memberikan pendampingan lanjutan apabila masih diperlukan, khususnya dalam proses penyempurnaan substansi pengaturan penjaminan kualitas pada DTSEN, agar ketentuan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan selaras dengan prinsip penjaminan kualitas statistik.

#### **4. Prioritas Presiden: Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional**

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan integrasi dan harmonisasi data sosial dan ekonomi yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik melalui Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik melaksanakan aktivitas berupa pendampingan kepada Tim Perban DTSEN dalam penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN, khususnya pada aspek penjaminan kualitas data, yang menghasilkan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN sebagai output utama dan landasan pengaturan implementasi DTSEN.

Kendala yang dihadapi selama pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan BPS tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN antara lain dinamika perubahan muatan dan cakupan pengaturan yang cukup tinggi, sehingga substansi pasal yang mengatur penjaminan kualitas DTSEN perlu terus disesuaikan. Kondisi ini berdampak pada perlunya penelaahan dan penyempurnaan berulang.

Solusi yang dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi intensif dengan tim penyusun Rancangan Peraturan BPS dengan terlibat aktif pada setiap rapat pembahasan Perban DTSEN. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan setiap perubahan substansi dapat segera direspons dan diakomodasi ke dalam pasal-pasal maupun pengaturan yang berkaitan dengan penjaminan kualitas DTSEN secara tepat dan konsisten. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah tetap membuka ruang koordinasi dan siap memberikan pendampingan lanjutan apabila masih diperlukan, khususnya dalam proses penyempurnaan substansi pengaturan penjaminan kualitas pada DTSEN, agar ketentuan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan selaras dengan prinsip penjaminan kualitas statistik.

### 3.4.2 Capaian Prioritas Presiden

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei *Baseline*. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), *Supplier* (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei *Baseline* dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei *Baseline* adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei *Baseline* pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut diantaranya adalah instrumen survei berupa kuesioner dan buku pedoman, moda pencacahan *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* dan *Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)* melalui aplikasi FASIH, *web monitoring*, *raw data* hasil pendataan, serta tabulasi dan analisis hasil pendataan yang dituangkan dalam bentuk *booklet* dan laporan. Output utama dari pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG adalah untuk mengukur dampak Program MBG terhadap gizi dan kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ketenagakerjaan. Output kegiatan ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan, memastikan ketepatan sasaran dan kualitas layanan, serta mengidentifikasi kendala dan praktik di lapangan. Hasil survei ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan program, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas keberlanjutan pelaksanaan Program MBG.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG antara lain penentuan indikator yang digunakan untuk mengukur dampak program MBG, ketidaksesuaian kerangka awal SPPG yang digunakan dalam pencacahan, rendahnya *response rate supplier*, serta padatnya waktu pelaksanaan. Program MBG adalah kebijakan pemerintah yang baru dilakukan di tahun 2025, sehingga masih ditemukan kesulitan dalam menentukan indikator untuk mengukur dampak program ini. Solusi yang dilakukan atas kendala ini adalah melakukan diskusi dan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait serta para pakar yang lebih mengetahui mengenai proses bisnis penyediaan MBG dan pengukuran dampak makan bergizi. Daftar SPPG yang telah beroperasi, yang diterima dari BGN, dijadikan dasar dalam penentuan sampel, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ada beberapa ketidaksesuaian diantaranya ditemukan SPPG yang belum beroperasi di lapangan sehingga perlu dilakukan penggantian sampel. Dampak ekonomi MBG salah satunya diukur melalui pendataan terhadap *supplier* sebagai pemasok bahan baku yang digunakan oleh SPPG. Pendataan terhadap *supplier* dilakukan dengan metode *Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)*, dimana responden mengisi sendiri kuesioner secara online. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan *response rate* dari *supplier* adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *supplier* serta monitoring saat periode pencacahan. Kendala utama terkait masalah administrasi Survei Monev Program MBG adalah keterlambatan anggaran masuk sementara pelaksanaan survei harus tetap dilaksanakan mengingat jadwal yang sudah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Pelaksanaan Survei Monev Program MBG yang dilaksanakan 2 tahap di tahun 2025, sehingga jadwal pelaksanaan menjadi padat. Salah satu solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan Survei Monev Program MBG berjalan sesuai jadwal.

### 3.4.3 Capaian Isu Strategis Nasional

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif. Pada tahap pengukuran, dilakukan perhitungan neraca arus energi dan emisi GRK menurut lapangan usaha dan komponen konsumsi akhir. Penyusunan indikator turunan dari neraca terkait seperti bauran energi terbarukan dalam konsumsi akhir, intensitas energi, serta intensitas emisi GRK. Pada tahap diseminasi hasil dilakukan baik kepada pemangku kepentingan nasional maupun internasional. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi kinerja berupa penyusunan publikasi resmi Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut meliputi rapat atau diskusi, dataset neraca arus dan neraca emisi GRK Indonesia tahun 2019–2023, indikator inti berupa intensitas energi dan intensitas emisi GRK, serta publikasi resmi BPS berjudul Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia 2019–2023 yang dirilis pada Juni 2025. Selain itu juga mendukung Global Data Collection terkait Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia yang dinaungi oleh United Nation Statistics Division (UNSD). Data emisi GRK perkapita juga berkontribusi dalam pengisian kuesioner BRICS. Output ini menjadi dasar penting dalam penyediaan data lingkungan strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Output Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi juga berkontribusi dalam pemenuhan rekomendasi DGI fase 3 untuk rekomendasi 1 dan 2. BPS diundang dalam beberapa pertemuan DGI sebagai pembicara seperti G20 DGI-3 Webinar: *Closing Data Gaps to Better Understand Energy Supply and Use* pada 2 Juni 2025 dan G20 DGI-3 *Global Conference* pada tanggal 17 Juni 2025 untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi di Indonesia.

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala yaitu kendala terkait koordinasi lintas kedeputian dan kementerian/lembaga. Atas kendala tersebut solusi yang dilakukan adalah dengan membangun koneksi serta melakukan koordinasi secara rutin baik dengan internal BPS maupun kementerian/lembaga. Selanjutnya terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu perbaikan sumber data yang sebelumnya masih bersumber dari dua versi *energy balance* BPS dan KESDM diharapkan tahun depan sudah menjadi satu sumber saja. Adapun rencana aksi lainnya, diantaranya

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan K/L pemangku kepentingan neraca arus energi seperti KESDM, BI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian; maupun K/L pemangku kepentingan neraca emisi GRK seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan; serta lembaga internasional pemangku kepentingan *climate change statistics* seperti UNSD, IMF DGI-3, OECD, BRICS.
2. *Mapping Global Warming Potential* versi AR2 ke AR5 melalui diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.  
Memperbaiki metode penghitungan untuk data *international bunkering* dengan bantuan lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan IEA dan melibatkan K/L pemangku kepentingan seperti BI, KESDM, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

### 3.5 Prestasi dan Inovasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik

Selain berupaya mencapai kinerja yang baik, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sehingga menghasilkan prestasi. Prestasi tersebut ditorehkan oleh pegawai dilingkungan Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Prestasi yang berhasil diperoleh selama tahun 2025 adalah:

1. Pegawai berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dalam kancah internasional, seperti :
  - *Seminar on Artificial Intelligence Innovation and Cooperation for China and ASEAN*
  - Pelatihan *Balance Sheet Approach (BSA)*
  - *Seminar on Enhancing Safety Capacity in Non-Coal Mines for Belt and Road Countries*
  - *Regional Training Workshop on SEEA Asset Accounts for Sustainable Development*
  - *Quarterly National Accounts/ High Frequency Indicators of Economic Activity*
  - Kontributor Penyusunan *Framework Small Area Estimation (SAE)*
  - Kontributor Penulisan *Voluntary National Review (VNR)*
1. Predikat "Berkualitas" dalam Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 untuk semua direktorat
2. Predikat "Sangat Baik (BB)" dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi
3. Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 untuk Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
4. Predikat Sangat Memuaskan (AA) pada Pengelolaan Arsip Tahun 2025 untuk semua direktorat

Kemudian, untuk mendukung tercapainya kinerja selama tahun 2025, Deputy Neraca dan Analisis Statistik telah berhasil melakukan inovasi agar pekerjaan lebih efisien. Inovasi tersebut diantaranya:

1. *Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI)* merupakan inovasi aplikasi berbasis kecerdasan artifisial yang mengintegrasikan data internal, eksternal, dan data fenomena untuk menghasilkan informasi analitis yang komprehensif, akurat, dan relevan. Platform ini mendukung analisis makroekonomi dan tren secara lebih mendalam dan responsif dalam penyusunan neraca nasional. Melalui teknologi analitik dan kecerdasan artifisial, PASTI meningkatkan efisiensi, eksplorasi, serta interpretasi data yang adaptif terhadap dinamika ekonomi. Mulai diimplementasikan pada 2025, PASTI diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kualitas analisis statistik.
2. *Penyebarluasan Output Statistik melalui Format Carousel*  
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik mengembangkan penyajian analisis dan *insight* dalam format *carousel* yang visual, ringkas, dan komunikatif guna meningkatkan daya tarik dan kemudahan pemahaman data. Inovasi ini terbukti memperluas jangkauan pembaca dan meningkatkan pemanfaatan output statistik. Format tersebut juga mendapat apresiasi dari Pusdiklat BPS dan dimanfaatkan dalam pengembangan kurikulum penyajian *insight* statistik, sehingga turut mendukung peningkatan kapasitas penyajian statistik di lingkungan BPS.
3. *Penyusunan Pedoman Indikator Komposit*  
Direktorat menyusun pedoman penyusunan indikator komposit untuk meningkatkan keseragaman, kualitas, dan akuntabilitas indikator statistik. Pedoman ini mengacu pada praktik terbaik internasional, khususnya OECD, dan diharapkan menjadi acuan bagi K/L dan Pemda dalam menghasilkan indikator yang metodologis, relevan, serta mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
4. *Pengembangan Gen-AI KBLI pada Sistem FASIH*  
Dalam mendukung transformasi digital, Direktorat berkolaborasi mengembangkan Gen-AI KBLI, sistem otomatis yang merekomendasikan kode KBLI berdasarkan deskripsi kegiatan usaha dan terintegrasi dalam aplikasi FASIH. Inovasi ini meningkatkan efisiensi pengkodean, mengurangi kesalahan klasifikasi, dan mendukung peningkatan kualitas data statistik ekonomi.
5. *Pengembangan SIPERI Kabupaten/Kota*  
Pengembangan Sistem Rekonsiliasi PDRB Tahunan dan Triwulanan Kabupaten/Kota (SIPERI) sebagai aplikasi pendukung proses rekonsiliasi PDRB Kabupaten/Kota guna meningkatkan konsistensi, akurasi, dan efisiensi pengolahan data.

6. Pembuatan *Dashboard* PDB–PDRB dan Indikator Turunannya  
Pengembangan *dashboard* untuk memvisualisasikan data PDB, PDRB, dan indikator turunannya secara *real-time* sehingga memudahkan pemantauan, analisis, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
7. Pembuatan *Dashboard* Indikator Hasil NIT  
Penyediaan *dashboard* indikator hasil NIT yang menyajikan data secara *real-time* guna memperkuat fungsi monitoring, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis data.
8. Portal Perekaman Transaksi Digital Indonesia  
Pengembangan portal sebagai sarana perekaman dan pengelolaan data transaksi digital secara terintegrasi untuk mendukung ketersediaan data yang lebih sistematis dan akurat.
9. *Dashboard* Perkembangan Transaksi Digital Indonesia  
Pengembangan dashboard monitoring sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Neraca Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengolahan data transaksi digital, serta mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

### 3.6 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Pada awal tahun 2025, pagu program PPIS yang tersedia berdasarkan alokasi anggaran BPS adalah sebesar Rp58.567.044.000 yang mana angka tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah maka berdampak dengan Pagu yang dapat digunakan menjadi Rp39.717.226.000 atau turun sebesar 32,19 persen dibanding pagu awal. Ketersediaan anggaran tersebut dalam Upaya mencapai output yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis 1 yaitu sebesar 99,70 persen.

Pemetaan anggaran menurut sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas terdiri atas program:

- 1) 2896.BMA.U01 Publikasi/ laporan indeks pembangunan manusia
- 2) 2896.BMA.004 Publikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik
- 3) 2896.QMA.006 Pemanfaatan *big data* untuk statistik resmi
- 4) 2898.BMA.007 Publikasi/laporan statistik neraca pengeluaran
- 5) 2899.BMA.006 Publikasi/laporan neraca produksi
- 6) 2899.BMA.009 Publikasi/ laporan neraca satelit pariwisata nasional (TSA)

Sasaran 2: Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas terdiri atas program:

- 1) 2896.BDB.100 Pembinaan statistik sektoral pengembangan dan analisis
- 2) 2898.BDB.100 Pembinaan statistik sektoral neraca pengeluaran
- 3) 2899.BDB.100 Pembinaan statistik sektoral neraca produksi

Tabel 6 Realiasi Dan Efisiensi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (**)
Sasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas								
Tingkat pemanfaatan data statistik lintas sektor	Persen	78,6	96,30	120,00	39.596.150.000	36.361.892.639	91,83	1,31
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas								
Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS kementerian/lembaga mitra deputy bidang neraca dan analisis statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Persen	19,84	19,84	100,00	121.076.000	81.359.180	67,20	1,49
Total				110,00	39.717.226.000	36.443.251.819	91,76	1,20

\*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

\*\*) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%)/Persentase realisasi anggaran 2025 (%). Jika  $\geq 1$  artinya efisien  
Jika  $< 1$  artinya tidak efisien

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila memiliki nilai efisiensi lebih dari 1 persen. Secara total, kegiatan Deputy Neraca dan Analisis Statistik dapat dikatakan efisien karena memiliki nilai efisiensi sebesar 1,20. Hal ini sejalan dengan nilai efisiensi dari masing-masing sasaran strategis yang berada di atas 1 persen. Sasaran strategis pertama adalah Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas memiliki efisiensi 1,31 sedangkan sasaran strategis kedua yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas memiliki efisiensi yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,49.

Upaya efisiensi tidak hanya kegiatan yang bersifat teknis tetapi termasuk nonteknis. Integrasi survei khusus yang dilakukan sejak tahun 2020 merupakan salah satu

upaya efisiensi terkait anggaran dan beban pekerjaan. Realisasi efisiensi lainnya selama tahun 2025 adalah:

1. Efisiensi kertas dimana untuk publikasi tidak lagi dicetak melainkan menggunakan media *softcopy* dan tersedia di *website* BPS;
2. Efisiensi listrik didukung dengan minimalisasi kegiatan lembur di luar jam kerja;
3. Efisiensi air didukung dengan minimalisasi kegiatan lembur di luar jam kerja;
4. Efisiensi dana dimana pelatihan survei triwulanan dan tahunan dilakukan secara jarak jauh menggunakan LMS warkop, dan proses rekonsiliasi dengan BPS Regional dilakukan secara daring.
5. Efisiensi pengurangan sejumlah kegiatan perjalanan dinas luar kota dan paket meeting, pengalihan kegiatan tatap muka (*offline*) menjadi kegiatan daring, serta integrasi berbagai kegiatan, seperti *workshop* dan pelatihan.



## Bab IV. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik merupakan perwujudan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran. Peran Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam mewujudkan misi BPS adalah: 1) Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan, 2) Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*) melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

### 4.2 Tindak Lanjut Capaian

Meskipun pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih ditemukan permasalahan yang memerlukan beberapa langkah perbaikan. Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

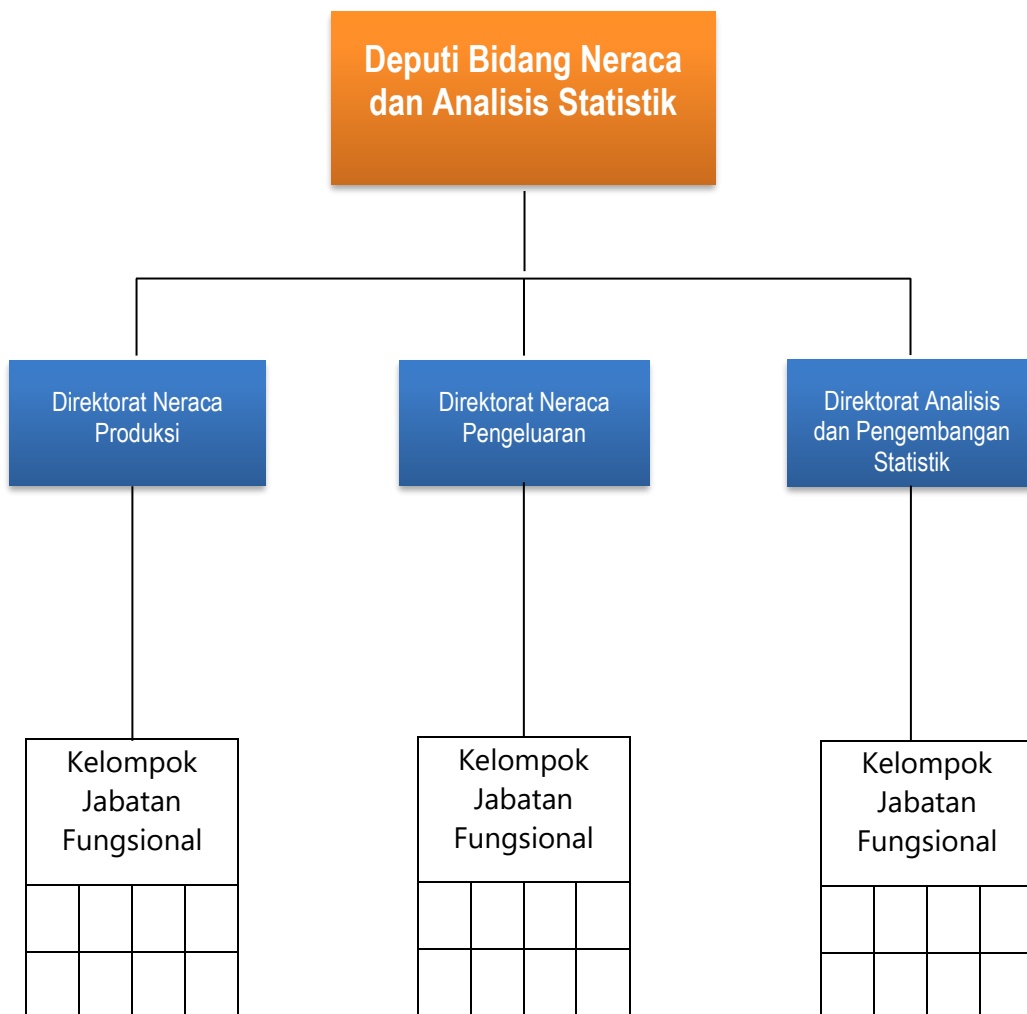
- 1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi (KISI) antar unit-unit kerja internal BPS yang bertanggung jawab baik dalam survei dan sensus maupun kompilasi data sekunder yang bersumber dari instansi lain, sehingga mampu mendapatkan data yang diinginkan tepat waktu.
- 2) Mengadakan pendekatan, sosialisasi dan peningkatan kerja sama yang lebih baik dengan instansi atau lembaga terkait dalam kaitannya dengan pengumpulan data sekunder.
- 3) Meningkatkan *response rate* pada survei di Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dengan: a) mensinkronisasi jadwal kegiatan survei dengan kegiatan lain, b) melakukan penyederhanaan instrumen survei agar mudah dipahami

- responden, c) mengintegrasikan survei khusus di Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang memiliki tujuan hampir sama;
- 4) Meningkatkan kerjasama, *sharing knowledge*, workshop dengan NSO lain dan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas SDM, terutama untuk penghitungan indikator statistik yang baru, seperti SDG's, QAF, SEEA, SUT, CVM dll;
  - 5) Menyusun matriks beban kerja antar personil perlu dilakukan sehingga beban kerja masing-masing SDM dapat terpetakan secara jelas. Dalam kasus adanya pekerjaan tambahan yang bersifat *adhoc*, pekerjaan dapat diberikan kepada staf yang memiliki beban kerja lebih ringan.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK

Peraturan Kepala BPS No. 007 Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020



## LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran/ Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Output/Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan			
SS.1.4.0 Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor	Persen	78,60	06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien			2896 Pengembangan dan Analisis Statistik
SS.2.4.0 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas			2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran
			2899 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Poin	19,84	

## LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
<b>Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan</b>			
SS.1.4.0 Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor	Persen	78,60
<b>Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien</b>			
SS.2.4.0 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	19,84

## LAMPIRAN 4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
<b>A. Direktorat Neraca Produksi</b>					
1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00
2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi	Persen	70,51	85,71	121,55
<b>B. Direktorat Neraca Pengeluaran</b>					
1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00
2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Pengeluaran	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Pengeluaran	Persen	75,85	85,10	112,20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
<b>C. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik</b>					
1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kegiatan Statistik yang memanfaatkan Big Data untuk Statistik Resmi	Persen	42,857	42,857	100,00
2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Analisis dan Pengembangan Statistik	Persen	64,47	81,51	120,00
<b>Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik</b>					
1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor	Persen	78,60	96,30	120,00
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	19,84	19,84	100,00

**LAMPIRAN 5 JUMLAH PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG  
NERACA DAN ANALISIS STATISTIK MENURUT UNIT  
KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2025**

Unit Kerja	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	Doktoral	Magister	Sarjana	Diploma III	SMA sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputi Bidang NAS	0	1	0	0	0	1
Dit. Neraca Produksi	1	33	30	1	0	65
Dit. Neraca Pengeluaran	0	28	33	0	0	61
Dit. Analisis dan Pengembangan Statistik	3	31	27	1	0	62
Jumlah	4	93	90	2	0	189

## LAMPIRAN 6 JUMLAH PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK MENURUT UNIT KERJA DAN GOLONGAN KEPANGKATAN TAHUN 2025

Unit Kerja	Golongan Kepangkatan											Total	
	II		III				IV						
	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Deputi Bidang NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Dit. Neraca Produksi	1	0	5	13	19	13	4	8	1	1	0	0	65
Dit. Neraca Pengeluaran	0	0	3	16	14	13	12	2	1	0	0	0	61
Dit. Analisis dan Pengembangan Statistik	0	0	4	13	14	15	7	4	4	1	0	0	62
Jumlah	1	0	12	42	47	41	23	14	6	2	1	0	189

## LAMPIRAN 7 JUMLAH PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK MENURUT UNIT KERJA DAN JABATAN TAHUN 2025

Unit Kerja	Jabatan							Total
	Staf	Terampil	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Eselon I/II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Deputi Bidang NAS	0	0	0	0	0	0	1	1
Dit. Neraca Produksi	6	1	0	18	28	11	1	65
Dit. Neraca Pengeluaran	7	0	0	15	30	8	1	61
Dit. Analisis dan Pengembangan Statistik	6	0	1	15	26	13	1	62
Jumlah	19	1	1	48	84	32	4	189

**LAMPIRAN 8 DAFTAR DOKUMEN PEMERINTAH  
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR HITUNG  
TINGKAT PEMANFAATAN DATA STATISTIK LINTAS  
SEKTOR DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS  
STATISTIK TAHUN 2025**

Nama Dokumen Pemerintah	Penggunaan Data Statistik Lintas Sektor
(1)	(2)
Renstra Kementerian BUMN	
Renstra Kementerian Investasi/BKPM	
Renstra Kementerian KLHK	
Renstra Kementerian PPN Bappenas	
Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	
Renstra Kementerian Perhubungan	
Renstra Kementerian Keuangan	Ya
Renstra Kemenko Bidang Perekonomian	
Renstra Kemenko Maritim dan Investasi	
Renstra Kementerian Koperasi Usaha Kecil Mikro	
Renstra Kementerian Perindustrian	
Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak	
Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	

## LAMPIRAN 9 DAFTAR K/L TARGET PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga Lokus Pembinaan	Jumlah	Direktorat yang membina
(1)	(2)	(3)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Dewan Ketahanan Nasional	6	Direktorat Neraca Produksi
Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Sekretariat Negara	6	Direktorat Neraca Pengeluaran
Komisi Yudisial Republik Indonesia Kementerian Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	6	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

## LAMPIRAN 10 DAFTAR PRESTASI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025

Rincian	Jenis Prestasi
(1)	(2)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Seminar on Artificial Intelligence Innovation and Cooperation for China and ASEAN</i></li> <li>2. Pelatihan <i>Balance Sheet Approach (BSA)</i></li> <li>3. <i>Seminar on Enhancing Safety Capacity in Non-Coal Mines for Belt and Road Countries</i></li> <li>4. <i>Regional Training Workshop on SEEA Asset Accounts for Sustainable Development</i></li> <li>5. <i>Quarterly National Accounts/ High Frequency Indicators of Economic Activity</i></li> <li>6. Kontributor Penyusunan <i>Framework Small Area Estimation (SAE)</i></li> <li>7. Kontributor Penulisan <i>Voluntary National Review (VNR)</i></li> </ol>	Dicapai oleh Pegawai di DBNAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Predikat "Berkualitas" dalam Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 untuk <b>semua direktorat</b></li> <li>9. Predikat "Sangat Baik (BB)" dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 untuk Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik</li> <li>10. Predikat Sangat Memuaskan (AA) pada Pengelolaan Arsip Tahun 2025 untuk <b>semua direktorat</b></li> </ol>	Dicapai oleh Unit Kerja di DBNAS

## Daftar Prestasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 (lanjutan)

Sertifikat Pengelolaan Kearsipan DNP



Sertifikat Pengelolaan Kearsipan DNPeng



Sertifikat Pengelolaan Kearsipan DAPS



Penghargaan PSB DAPS



Penghargaan Statistik Berkualitas DNP



Penghargaan Statistik Berkualitas DAPS



## Daftar Prestasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 (lanjutan)

Penghargaan Implementasi AKIP DAPS  
Terbaik V

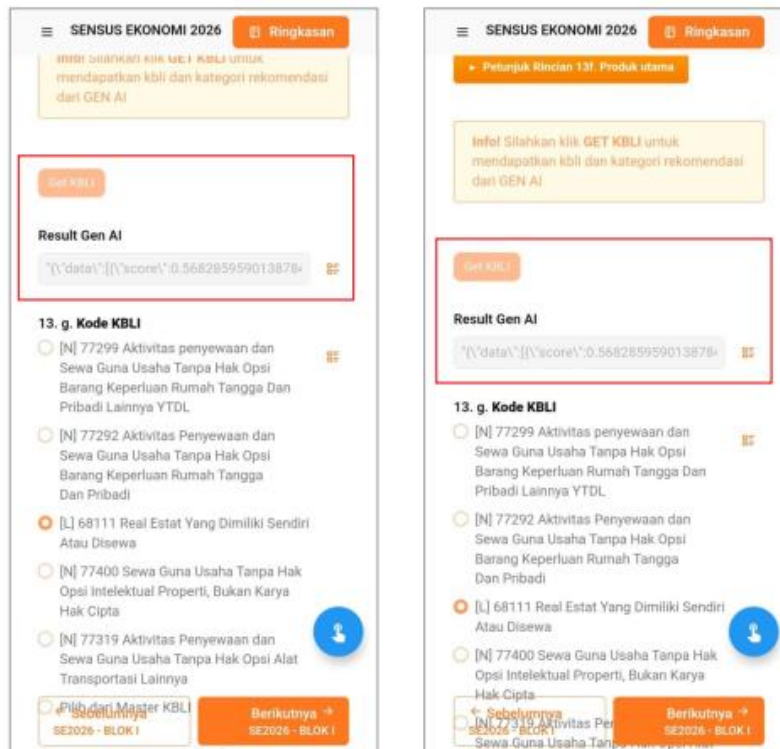


## LAMPIRAN 11 DAFTAR INOVASI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN 2025

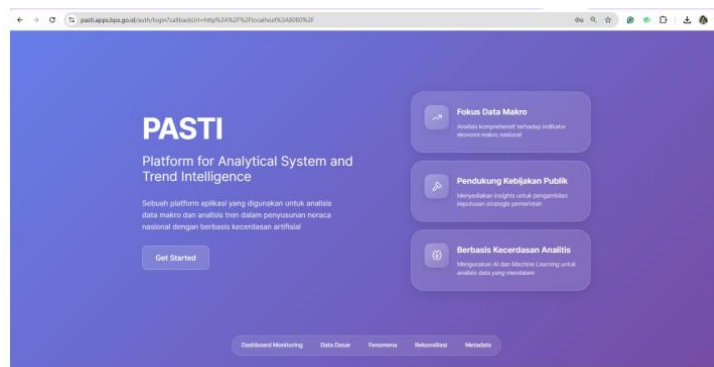
Rincian	Unit Kerja
(1)	(2)
1. Pembuatan Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI) Sistem Rekonsiliasi PDRB Tahunan dan Triwulanan Kabupaten/Kota (SIPERI Kabupaten/Kota)	Direktorat Neraca Produksi
2. Pembuatan Dashboard PDB-PDRB dan indikator turunannya	
3. Pembuatan Dashboard indikator-indikator hasil NIT	
4. Portal Perekaman Transaksi Digital Indonesia	
5. Dashboard Perkembangan Transaksi Digital Indonesia	
6. Pembuatan Sistem Rekonsiliasi PDRB Tahunan dan Triwulanan Kabupaten/Kota (SIPERI Kabupaten/Kota) Pembuatan Dashboard PDB-PDRB dan indikator turunannya	Direktorat Neraca Pengeluaran
7. Pembuatan Dashboard indikator-indikator hasil NIT	
8. Portal Perekaman Transaksi Digital Indonesia	
9. Dashboard Perkembangan Transaksi Digital Indonesia	
10. Penerapan SPOTLight (Statistical Performance and Output Tracking Light)	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
11. Penerapan Expert Review untuk Peningkatan Kualitas Booklet Cerita Data Statistik untuk Indonesia	
12. Inovasi Penyebarluasan Output Statistik melalui Format Carousel	
13. Pengembangan Gen-AI KBLI pada Sistem FASIH	
14. Pembangunan Dashboard MyRepo	

## Daftar Inovasi Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Tahun 2025 (lanjutan)

### Gen AI KBLI (pada Aplikasi Fasih SE 2026)



### Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI)



## LAMPIRAN 12 ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan/Output	Pagu Awal Tahun (Rp)	Pagu yang dapat digunakan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Sasaran 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan</b>	<b>57.531.372.000</b>	<b>57.027.423.000</b>	<b>49.840.626.775</b>	<b>87,40</b>
2896 Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	40.083.460.000	34.841.957.000	31.862.838.335	91,45
2897 Persentase Publikasi/Laporan Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis yang Berkualitas		17.431.273.000	13.478.734.136	77,33
2898 Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	8.017.571.000	1.516.349.000	1.443.979.914	95,23
2899 Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	9.430.341.000	3.237.844.000	3.055.074.390	94,36
<b>Sasaran 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien</b>	<b>1.033.672.000</b>	<b>121.076.000</b>	<b>81.359.180</b>	<b>67,20</b>

2896 Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	299.800.000	33.500.000	27.205.200	81,21
2898 Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Pengeluaran	359.760.000	40.200.000	39.323.180	97,82
2899 Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi	374.112.000	47.376.000	14.830.800	31,30
<b>Total</b>	<b>58.565.044.000</b>	<b>57.148.499.000</b>	<b>49.921.985.955</b>	<b>87,35</b>
<b>Total tanpa 2897</b>	<b>58.565.044.000</b>	<b>39.717.226.000</b>	<b>36.443.251.819</b>	<b>91,76</b>





**SENSUS  
EKONOMI  
2026**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id>, E-mail: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)